

# KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) COURSE DATA SAINS UNTUK BISNIS DAN PERKANTORAN

## Modul 2: Pemanfaatan Data BPS

---

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan:

1. Mampu memahami dan menjelaskan Kedudukan BPS dalam Penyelenggaraan Kegiatan Statistik
2. Mampu memahami dan menjelaskan Proses Pengumpulan dan Diseminasi Data BPS
3. Mampu memahami dan menjelaskan Indikator Strategis BPS dan Pemanfaatannya dalam Pengambilan Kebijakan

### A. Latar Belakang

Data Statistik sering digunakan sebagai bahan rujukan dalam kegiatan perencanaan, evaluasi, pengambilan keputusan, formulasi kebijakan bahkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi. Dalam konteks pembangunan nasional, statistik seringkali digunakan dalam penentuan asumsi-asumsi ekonomi makro serta pembentukan indikator-indikator capaian pembangunan.

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik mengatur tentang peran BPS dalam sistem perstatistikan nasional. Salah satunya memberikan pembinaan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan melakukan sosialisasi penggunaan statistik kepada berbagai kalangan.

Untuk dapat menjalankan peran tersebut dianggap perlu untuk menyusun materi terstruktur yang akan digunakan dalam pembinaan kegiatan statistik dan sosialisasi pemanfaatan data statistik di masyarakat khususnya di kalangan akademisi.

### B. Materi dan Prosedur

#### 1. Kedudukan Badan Pusat Statistik dalam Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Penyediaan data Statistik yang akurat sangat dibutuhkan semua pihak sebagai dasar dalam melakukan banyak hal, seperti perencanaan, penentuan kebijakan, penetapan program/ atau kegiatan, bahkan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi. Data dan Informasi Statistik yang akurat tidak hanya dibutuhkan oleh pemerintah, namun juga sangat dibutuhkan oleh pihak swasta, para pelaku bisnis, bahkan masyarakat secara umum.

## KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) COURSE DATA SAINS UNTUK BISNIS DAN PERKANTORAN

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, penyelenggaraan statistik dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Statistik Dasar, Statistik Sektoral dan Statistik Khusus.

### a. Statistik Dasar

Statistik Dasar adalah Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.

### b. Statistik Sektoral

Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

### c. Statistik Khusus

Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Sebagai pelaksana dari penyelenggaraan Statistik dasar, BPS memiliki Kedudukan, Tugas dan Fungsi seperti yang diatur :

- a. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 1).
- b. BPS Secara khusus memiliki fungsi penting sebagai Lembaga yang menyelenggarakan kegiatan statistik seperti sensus atau survei-survei nasional.
- c. Sebagai Lembaga non-kementerian, kedudukan BPS terhadap Lembaga pemerintah atau kementerian lain adalah independent. Kondisi tersebut menjadikan BPS dapat berperan sebagai check and control semua angka statistik Lembaga pemerintah.

BPS memiliki tugas-tugas pokok, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, sebagai berikut :

- a. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.

## KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) COURSE DATA SAINS UNTUK BISNIS DAN PERKANTORAN

- b. Membantu kegiatan statistik di kementrian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
- c. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
- d. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

### 2. Pengumpulan dan Diseminasi Data BPS

#### A. Jenis Pengumpulan Data

Terdapat beberapa cara yang dilakukan BPS dalam melakukan kegiatan pengumpulan Data, yaitu Sensus, Survei dan Kompilasi Data Administratif.

##### a. Sensus

Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.

Karena pelaksanaan sensus mencakup seluruh unit populasi, maka sensus memiliki kelebihan, seperti: 1) hasilnya lebih akurat karena bukan merupakan estimasi, 2) Terbebas dari kesalahan sampling, 3) Hasil sensus dapat digunakan sebagai kerangka sampel induk untuk kegiatan survei.

Sementara itu sensus mengalami kelemahan dalam hal pelaksanaannya, karena: 1) Membutuhkan biaya yang sangat besar, 2) membutuhkan waktu pelaksanaan yang lama, 3) Membutuhkan tenaga pendata yang banyak, dan 4) Kemungkinan human error yang tinggi dalam pendataan.

Pemerintah memiliki tiga kegiatan sensus yang utama, yaitu Sensus Penduduk (SP), Sensus Pertanian (ST) dan Sensus Ekonomi (SE). Semua kegiatan sensus tersebut dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Di BPS, Sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali. Sensus Penduduk dilakukan pada tahun yang berakhiran 0, contoh SP 1970, SP 1980, dan seterusnya. Sensus Pertanian dilakukan pada tahun yang berakhiran 3, contoh ST 1983, ST 1993, dan seterusnya. Sementara Sensus Ekonomi dilakukan pada tahun yang berakhiran 6, contoh SE 1986, SE 1996, dan seterusnya.

- b. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sebagian elemen dari populasi, untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat

## KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) COURSE DATA SAINS UNTUK BISNIS DAN PERKANTORAN

tertentu. Sebagian elemen dari populasi tersebut disebut juga dengan sampel. Survei dilaksanakan karena pelaksanaan sensus terhadap populasi sulit dilakukan. Oleh karena itu, dilakukanlah kegiatan survei yang tujuan utamanya adalah untuk menduga karakteristik populasi.

Karena digunakan untuk menduga populasi, maka sampel yang diamati haruslah sampel yang mewakili. Oleh karena itu, pengambilan sampel memerlukan Teknik sampling yang tepat agar sampel yang diambil benar-benar mewakili populasi. Dari pengamatan terhadap sampel diperoleh ukuran-ukuran yang disebut dengan statistik.

Terdapat beberapa kelebihan survei, diantaranya: 1) Biaya yang digunakan untuk survei lebih hemat dibandingkan sensus, 2) Hemat waktu dan tenaga, 3) Kegiatan survei lebih mudah diawasi, 4) Non sampling error cenderung lebih kecil, 5) Cakupan variabel data yang dikumpulkan bisa lebih luas, 6) Kesalahan dapat diatur dan diukur.

Meskipun demikian, survei memiliki kelemahan juga, diantaranya: 1) Hasil dari survei merupakan estimasi, 2) Pengambilan sampel memerlukan kerangka sampel. Untuk membuat kerangka sampel dibutuhkan biaya yang besar, 3) Terdapat kesalahan sampling. Survei lebih banyak dilakukan oleh peneliti dibandingkan dengan sensus. BPS juga memiliki banyak kegiatan survei diantaranya adalah Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Berbeda dengan periode pendataan Sensus yang 10 tahun sekali, maka periode pendataan Survey, lebih pendek seperti bulanan, triwulanan, semester, atau tahunan.

- c. Kompilasi Produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat. Adapun kelebihan dari produk administrasi adalah datanya yang lebih update/realtime. Namun kekurangannya adalah, kualitas data yang dikumpulkan perlu lebih dicermati lagi, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan datanya (seperti pada registrasi penduduk), ataupun karena tertib administrasi pengumpulan data yang dilakukan oleh produsen datanya belum memadai. Contoh kompilasi produk administrasi yang dilakukan BPS, seperti Survey Lingkungan Hidup, Survey Politik dan Keamanan dan lain-lain, yang mengutip data sekunder yang dihasilkan oleh penyelenggara kegiatan statistik sektoral.

## KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) COURSE DATA SAINS UNTUK BISNIS DAN PERKANTORAN

### B. Tahapan Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan Data, BPS merujuk pada prinsip *Generic Statistikal Business Process Model* (GSBPM). GSBPM adalah proses bisnis yang sesuai kerangka dan terminologi proses statistik yang harmonis. GSBPM diterapkan dengan tujuan:

- Statistik yang dihasilkan berkualitas
- Dapat mengintegrasikan data dengan standar metadata pada proses dokumentasi
- Adanya harmonisasi infrastruktur penghitungan statistik.
- Tersedianya suatu kerangka yang dapat digunakan dalam proses *quality assessment* dan perbaikan.

Manfaat yang diharapkan dari penerapan prinsip GSBPM dalam pengumpulan data adalah:

- Mengelola kegiatan statistik menjadi lebih mudah.
- Mengefisienkan biaya dan sumberdaya lainnya.
- Menghasilkan data berkualitas..
- Framework untuk penyelenggaraan kegiatan statistik
- Mendokumentasikan proses bisnis statistik.

Tahapan – tahapan yang dilakukan dalam GSBPM adalah sebagai berikut:

**a. Specify Need** (Identifikasi Kebutuhan), yang meliputi:

- Mengidentifikasi Kebutuhan,
- Konsultasi dan konfirmasi kebutuhan
- Menentukan tujuan
- Identifikasi konsep dan definisi
- Memeriksa ketersediaan data
- Membuat proposal kegiatan (Term of Reference)

**b. Design** (Rancangan), yang meliputi:

- Merancang Output
- Merancang deskripsi variabel
- Merancang pengumpulan data
- Merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel
- Mendesain sampling
- Merancang pengolahan dan analisis

## KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) COURSE DATA SAINS UNTUK BISNIS DAN PERKANTORAN

- Merancang system dan alur kerja
- c. Build** (Implementasi Rancangan), yang meliputi:
  - Membuat instrument pengumpulan data (kuesioner)
  - Membangun komponen diseminasi
  - Memastikan alur kerja berjalan dengan baik
  - Menguji sistem, instrument, dan proses bisnis statistik
  - Finalisasi system
- d. Collect** (Pengumpulan), yang meliputi:
  - Membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel
  - Mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas
  - Melakukan pengumpulan data
- e. Process** (Pengolahan), yang meliputi:
  - Integrasi Data
  - Penyuntingan (editing), penyahihan (validation), dan imputasi
  - Menghitung penimbang (weight)
  - Melakukan estimasi dan agregat
- f. Analyse** (Analisis), yang meliputi:
  - Menyiapkan naskah output (tabulasi)
  - Penyahihan output (pemeriksaan, konsisten antartabel)
  - Interpretasi Output
  - Penerapan Disclosure Control
- g. Disseminate** (Diseminasi), yang meliputi:
  - Sinkronisasi antara data dengan metadata
  - Menghasilkan produk diseminasi
  - Manajemen rilis produk diseminasi
  - Mempromosikan produk diseminasi
  - Manajemen user support
- h. Evaluate** (Evaluasi), yang meliputi :
  - Mengumpulkan masukan evaluasi
  - Evaluasi hasil

## KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) COURSE DATA SAINS UNTUK BISNIS DAN PERKANTORAN

Contoh Penerapan GSBPM, yang dilakukan dalam Penyelenggaran Statistik Kompilasi Data Kesehatan

### **a. Identifikasi Kebutuhan**

- Akan diperoleh gambaran tentang kondisi kesehatan yang ada di satu daerah
- Akan ditentukan variabel kesehatan apa saja yang relevan yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan di suatu wilayah.

### **b. Rancangan**

- Membuat rancangan perangkat pengumpulan data → Kompilasi produk administrasi
- Menetapkan data yang dibutuhkan (data lingkungan, demografi penduduk, fasilitas kesehatan, angka kematian, angka kesakitan, dll)
- Menentukan darimana data kesehatan tersebut akan diperoleh (sumber data)
- Menyusun rancangan pengolahan data kesehatan
- Menyusun rancangan tabulasi dan analisis (outline analisis)

### **c. Implementasi Rancangan**

- Membuat instrument pengumpulan data
- Menyusun aplikasi pengolahan sederhana hasil kompilasi data kesehatan (contoh dengan Ms excel)

### **d. Pengumpulan**

- Briefing petugas pengumpul data
- Pengumpulan Data
- Memastikan data yang dikompilasi dilengkapi dengan metadata
- Melakukan editing coding.
- Melakukan entry data.

### **e. Pengolahan**

- Melakukan integrasi hasil
- Melakukan penyuluhan (editing), penyalihan (validation).
- Tabulasi hasil

### **f. Analisis**

- Melakukan validasi output, salah satunya dengan cara membandingkan data pendidikan yang dihasilkan dengan data lainnya ataupun periode sebelumnya.
- Interpretasi hasil kompilasi produk administrasi data kesehatan

### **g. Diseminasi**



## KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) COURSE DATA SAINS UNTUK BISNIS DAN PERKANTORAN

- Penyusunan Metadata
- Menyusun laporan akhir
- Memastikan bahwa hasil akhir dapat menjawab tujuan survei,
- Merilis laporan akhir,
- Promosi produk melalui website, workshop, atau media lainnya.

### h. Evaluasi

- Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan – diseminasi.

### Contoh Rancangan Tabulasi

Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	Rumah Sakit	Puskesmas	Balai pengobatan	Klinik spesialis	apotek
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah					

Sumber: .....

Jumlah Tenaga Dokter Puskesmas menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	Dokter Umum	Dokter Spesialis	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah					

Sumber: .....

Rasio Dokter Puskesmas dengan jumlah Puskesmas menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	Dokter Umum	Dokter Spesialis	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Jumlah	Puskesmas	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah							

Sumber: .....

### Contoh Interpretasi Hasil dan Tabulasi

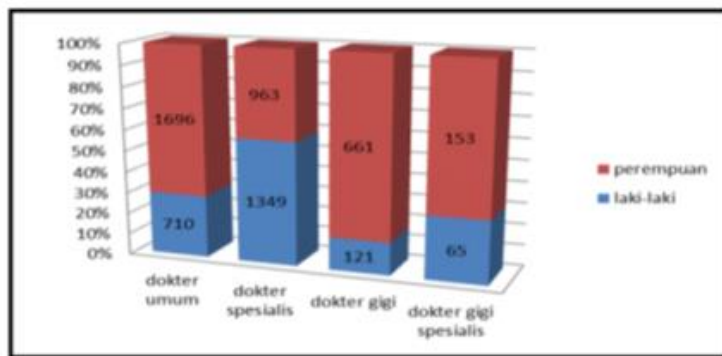
Tabel 7. Rasio Dokter dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

No	Kabupaten/ Kota	Dokter Umum	Dokter Spesialis	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Jumlah	Puskesmas	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jakarta Pusat	174	120	60	120	474	43	11
2.	Jakarta Utara	150	73	58	73	354	49	7
3.	Jakarta Barat	282	90	98	90	560	75	7
4.	Jakarta Selatan	334	85	115	84	618	79	8
5.	Jakarta Timur	337	159	119	159	774	88	9
6.	Kep. Seribu	33	120	3	0	36	6	6
	Jumlah	1.310	527	453	526	2.816	340	8

Sumber: data olahan



## KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) COURSE DATA SAINS UNTUK BISNIS DAN PERKANTORAN



Gambar 6. Sebaran Tenaga Medis Menurut Jenisnya di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

Dari Tabel disamping terlihat bahwa penyebaran tenaga dokter di enam wilayah DKI Jakarta hampir merata dengan rasio tenaga dokter di puskesmas rata-rata sebesar 8 dokter per puskesmas, dengan rasio terendah berada di wilayah Kepulauan Seribu, yaitu sebesar 6 dokter per puskesmas, dan rasio tertinggi terdapat di Jakarta Pusat dengan rasio sebesar 11 dokter per puskesmas

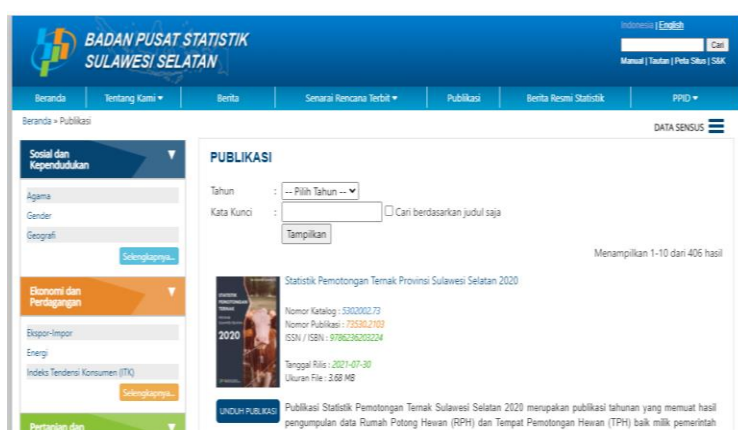
### C. Diseminasi Data BPS

Salah satu misi BPS dalam penyelenggaraan pembangunan adalah memberikan pelayanan prima dalam bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien.

Pelayanan BPS Sulawesi Selatan dalam penyebarluasan Produk-produk BPS dilakukan baik melalui Pusat Statistik Terpadu (PST) ataupun melalui layanan website BPS, yang dapat dikunjungi pada situs [sulsel.bps.go.id](http://sulsel.bps.go.id).



### Pusat Statistik Terpadu (PST)



## KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) COURSE DATA SAINS UNTUK BISNIS DAN PERKANTORAN

Layanan Website BPS ([sulsel.bps.go.id](https://sulsel.bps.go.id))

### 3. Indikator Strategis BPS dan Pemanfaatannya Bagi Pengambilan Kebijakan

Penyediaan data dan informasi yang akurat sangat dibutuhkan semua pihak sebagai dasar dalam melakukan banyak hal, baik perencanaan, penentuan kebijakan, menetapkan program/atau kegiatan, bahkan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi. Data dan informasi yang akurat bukan saja dibutuhkan oleh pemerintah, namun juga sangat dibutuhkan oleh pihak swasta, para pelaku bisnis, bahkan masyarakat secara umum.

Sebagai dasar bagi penentuan suatu kebijakan dan pembuatan suatu keputusan, maka data yang digunakan harus berkualitas dan berdasarkan kepada “fakta” atau kejadian yang sesungguhnya (*evidence based policy making*). Data dikatakan berkualitas jika memenuhi 6 dimensi data, yaitu:

#### 1. Relevansi

Memenuhi kebutuhan pengguna, baik dari aspek cakupan maupun konten.

#### 2. Akurasi

Mampu mengukur/menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari suatu peristiwa/fenomena.

#### 3. Aksesibilitas

Data yang dihasilkan mudah diakses

#### 4. Koherensi dan Keterbandingan

Konsisten dan selaras dengan statistik lain dari sumber yang berbeda dalam menggambarkan peristiwa atau fenomena sehingga dapat dibandingkan antar wilayah dan waktu.

#### 5. Aktualitas dan Tepat Waktu

Memiliki perbedaan jangka waktu yang pendek dengan peristiwa atau fenomena dan disebarluaskan/didesiminasikan sesuai jadwal.

#### 6. Interpretabilitas

Disajikan secara jelas dan mudah dipahami.

Terdapat beberapa Indikator Strategis yang dihasilkan dalam kegiatan penyelenggaraan Statistik dasar yang dilakukan oleh BPS, diantaranya adalah:

#### 1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

## KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) COURSE DATA SAINS UNTUK BISNIS DAN PERKANTORAN

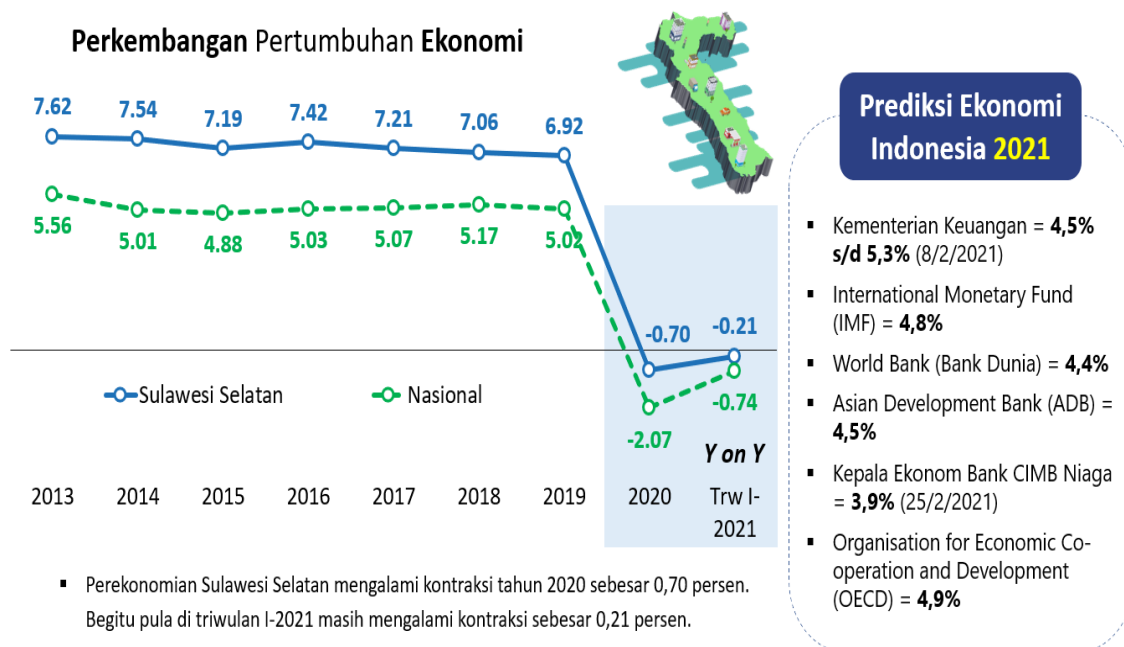
Beberapa konsep definisi dan manfaat PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi dijelaskan sebagai berikut:

- PDRB adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- PDRB dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan
  - PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) → menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu negara
  - PDRB atas dasar harga konstan (riil) → untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.
- PDRB dapat dihitung dari tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran.
  - **PDRB Produksi** adalah penjumlahan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah regional/negara dalam jangka waktu tertentu
  - **PDRB Pendapatan** adalah nilai jumlah pendapatan (balas jasa) yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki atau dikuasai oleh residen suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
  - **PDRB Pengeluaran** adalah nilai pengeluaran “akhir” berbagai produk barang & jasa untuk konsumsi akhir (RT, LNPR & Pemerintah), investasi fisik (PMTB & PI), dan ekspor neto (X-M) di suatu wilayah pada suatu periode tertentu (satu tahun)
- **Pertumbuhan Ekonomi** adalah menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Dihitung dengan PDRB ADHK. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.
  - Meningkatkan: jika pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya
  - Melambat : jika pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh positif, tetapi lebih rendah dari periode sebelumnya
  - Turun/kontraksi: jika pertumbuhan ekonomi negative
- **Distribusi PDRB** adalah Sumbangan dari setiap satuan unit pengamatan (lapangan usaha dalam PDB/PDRB sektoral atau penggunaan dalam PDRB/PDB pengeluaran)

## KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) COURSE DATA SAINS UNTUK BISNIS DAN PERKANTORAN

terhadap total agregat PDRB/PDB yang dinyatakan dalam persentase. **Manfaatnya:**  
Menunjukkan peranan/sumbangan setiap sektor ekonomi terhadap PDB/PDRB pada periode tertentu

### Data Infografis Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan & Nasional (Persen)



## 2. Data Kemiskinan

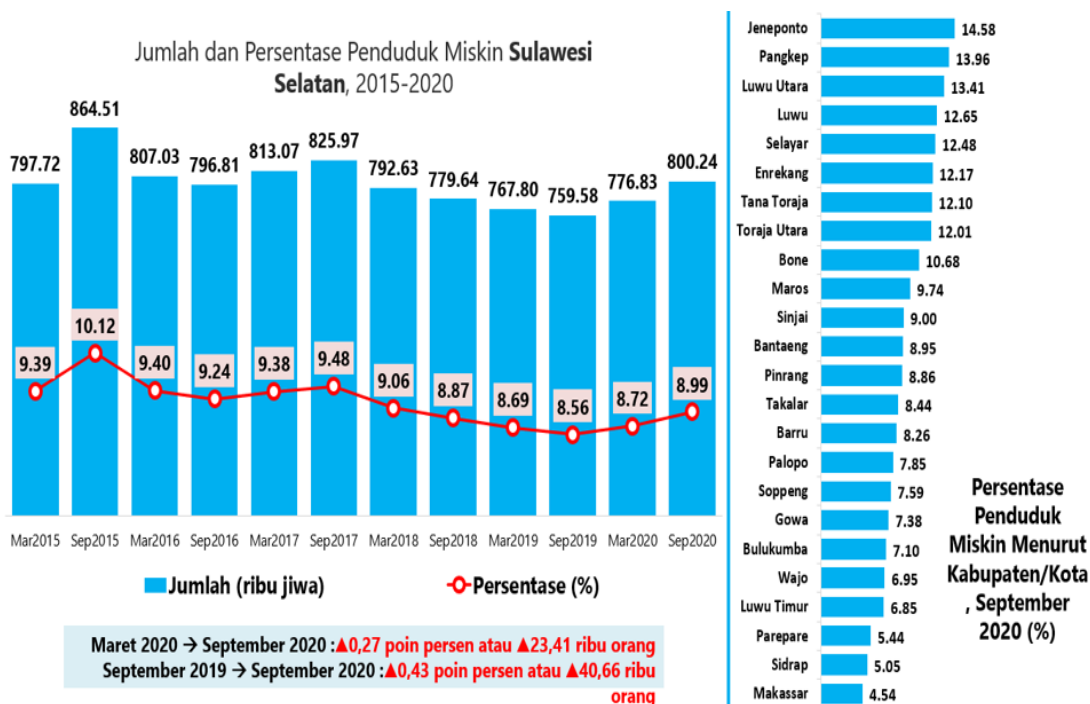
Beberapa Konsep Definisi dan Manfaat Data Kemiskinan, dijelaskan sebagai berikut:

- BPS menggunakan pendekatan *Basic need Approach* (Pendekatan Kebutuhan Dasar) dalam mendefinisikan kemiskinan, yaitu Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (dari sisi pengeluaran).
- Kebutuhan dasar makanan adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kkal perkapita perhari (diwakili paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 jenis komoditi).
- Kebutuhan dasar non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lainnya (diwakili 51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non-makanan di pedesaan).
- Terdapat beberapa indikator yang digunakan di dalam mengukur kemiskinan, yaitu:

## KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) COURSE DATA SAINS UNTUK BISNIS DAN PERKANTORAN

- Headcount Index (P0), yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk
  - **Poverty Gap Index (P1)/Indeks Kedalaman Kemiskinan:** Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran dari garis kemiskinan.
  - **Poverty Severity (P2)/Indeks Keparahan Kemiskinan:** Semakin tinggi nilai indeks, makin tinggi ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin.
- Manfaat pengukuran kemiskinan:
- Sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan
  - Sebagai monitoring untuk mengetahui capaian pembangunan
  - Sebagai alat yang digunakan untuk melihat perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah (Provinsi, Kab/Kota, Desa/Kota).
  - Sebagai alat untuk menentukan sasaran program bantuan, seperti Program Bansos, BPNT, PKH, dan lain-lain.

### Data Infografis Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Selatan



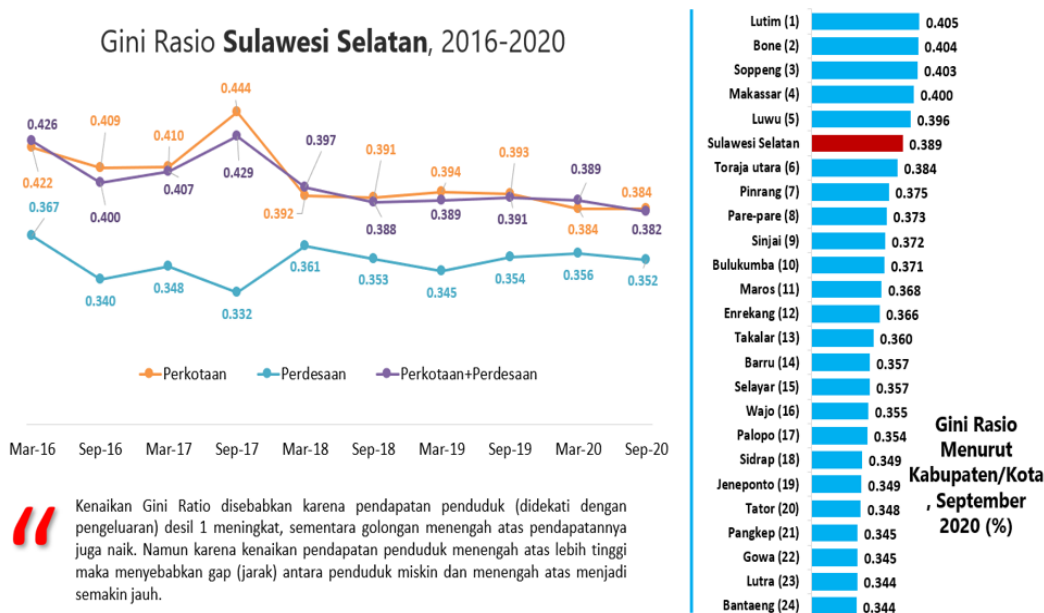
### 3. Data Gini Ratio dan Ketimpangan Pendapatan

Beberapa Konsep dan Definisi Gini Ratio, dijelaskan sebagai berikut:

## KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) COURSE DATA SAINS UNTUK BISNIS DAN PERKANTORAN

- Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan persentase kumulatif penduduk.
- Manfaat Gini ratio, digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat secara menyeluruh.
- Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai berarti ketimpangan sempurna
- Berdasarkan konsep dan definisi (Ukuran Bank Dunia), pendapatan penduduk dikelompokkan dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu:
  - 40% penduduk dengan pendapatan rendah,
  - 40% penduduk dengan pendapatan menengah,
  - 20% penduduk dengan pendapatan tinggi
- Sama halnya dengan Gini Ratio, ukuran ketimpangan Bank Dunia juga digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di suatu wilayah.
- Interpretasi dari ketimpangan Bank Dunia, dilihat dari proporsi 40 % penduduk dengan pendapatan rendah:
  - Kurang dari 12 % → ketimpangan pendapatan tinggi
  - Antara 12 sd 17% → ketimpangan pendapatan sedang/menengah
  - Lebih dari 17% → ketimpangan pendapatan rendah

### Data Infografis Gini Rasio Sulawesi Selatan 2016 - 2020





## KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) COURSE DATA SAINS UNTUK BISNIS DAN PERKANTORAN

### 4. Data Inflasi

Beberapa Konsep Definisi dan Manfaat Data Inflasi, dijelaskan sebagai berikut:

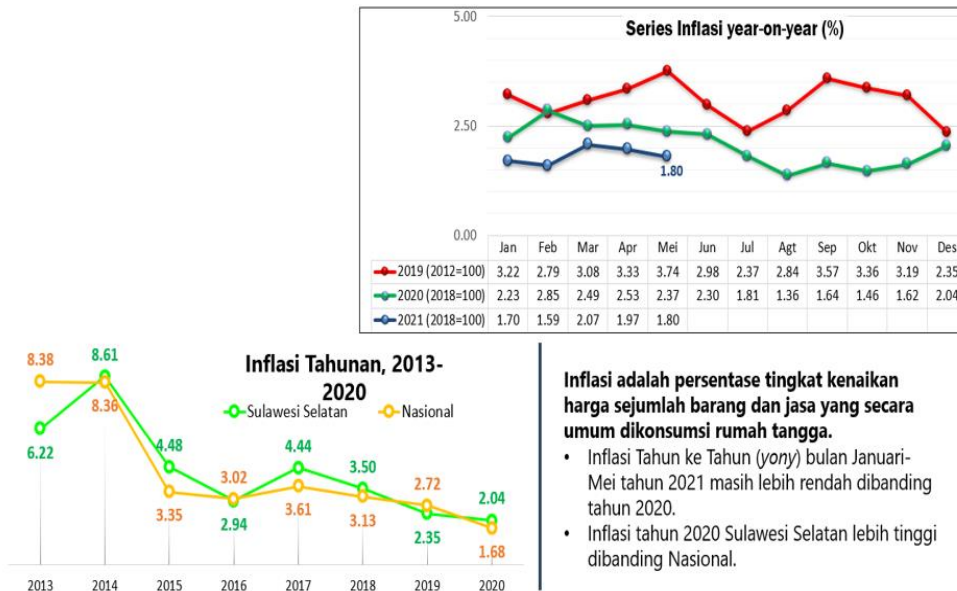
- Inflasi adalah Persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Sebaliknya Deflasi adalah Persentase penurunan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga
- Perhitungan perubahan harga tercakup dalam suatu indeks harga yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI)
- Data Inflasi sangat penting sebagai alat bagi perencanaan dan pengambilan keputusan, dengan beberapa manfaat sebagai berikut:
  - Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*wage indexation*)
  - Penyesuaian Nilai Kontrak (*contractual payment*)
  - Eskalasi Nilai Proyek (*Project Escalation*)
  - Penentuan Target Inflasi (*inflation targeting*)
  - Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*budget indexation*)
  - Sebagai pembagi PDB/PDRB (*GDP Deflator*)
  - Sebagai proksi perubahan biaya hidup (*proxy of cost of living*)
  - Indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham
- Interpretasi Data Inflasi:
  - Inflasi  $< 0$ : tingkat harga mengalami penurunan, disebut deflasi
  - Inflasi  $= 0$ : tingkat harga tetap
  - Inflasi  $> 0$ : tingkat harga mengalami peningkatan, disebut inflasi
- Terdapat beberapa faktor/kondisi yang menjadi pemicu terjadinya Inflasi, sebagai berikut:
  - Ekspektasi Inflasi  
Contoh: Kenaikan tarif dasar listrik (TDL), BBM, dan Elpiji (komoditas yang berdampak luas). Masih wacana naik, namun secara ekspektasi, pasar akan menyambutnya dengan negatif (harga mulai naik).
  - Volatilitas Nilai Tukar  
Kenaikan harga akibat dari perilaku bisnis yang tidak sehat. Untuk menjaga inflasi dilakukan operasi pasar untuk menjamin pasokan aman di tengah masyarakat
  - Output Gap



## KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) COURSE DATA SAINS UNTUK BISNIS DAN PERKANTORAN

Inflasi terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran

### Data Infografis Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional



n sebagai berikut:

an oleh penduduk

usia kerja selama periode tertentu. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur.

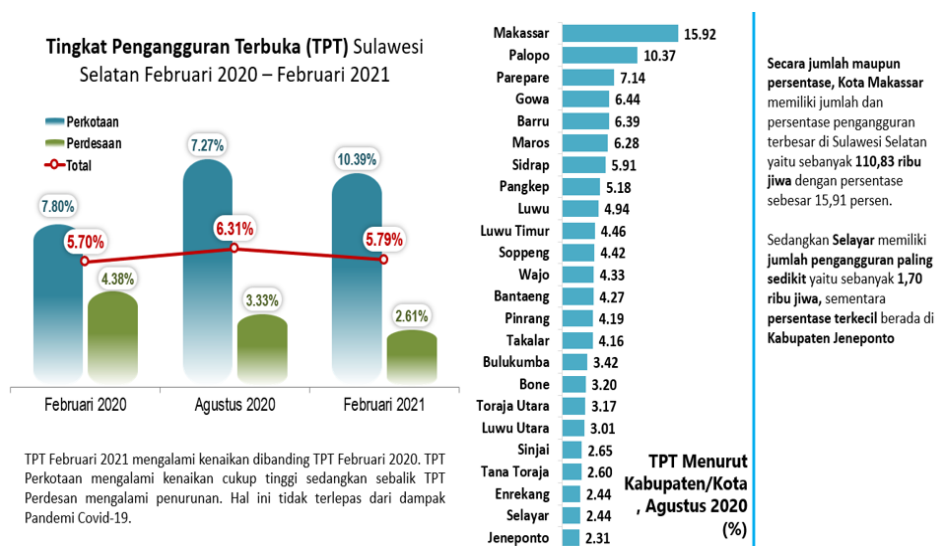
- Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan lainnya).
- Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (economically active population) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun) dan tanpa batas usia kerja.
- Bekerja, adalah Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan secara berturut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha.
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), adalah Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari

## KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) COURSE DATA SAINS UNTUK BISNIS DAN PERKANTORAN

penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu.

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), adalah Persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada
- Manfaat data TPT adalah untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal: TPT 6%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran.

### Data Infografis TPT Menurut Kabupaten/Kota se- Sulawesi Selatan



## 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Beberapa Konsep Definisi dan Manfaat IPM dijelaskan sebagai berikut:

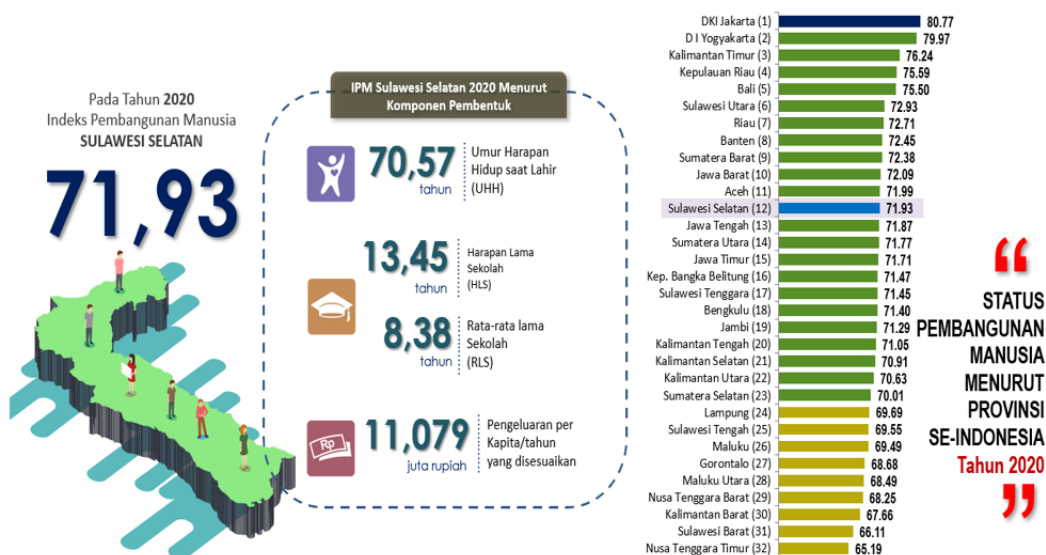
- IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).
- IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- IPM merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indikator pembentuk indeks, yaitu umur panjang dan hidup sehat (diukur dari Angka Harapan Hidup / AHH),

## KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) COURSE DATA SAINS UNTUK BISNIS DAN PERKANTORAN

pengetahuan (diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah / RLS dan Harapan Lama Sekolah / HLS) dan standar hidup layak (diukur melalui Pengeluaran perkapita yang disesuaikan atau Purchasing Power Parity / PPP).

- IPM menyediakan data yang sangat penting bagi perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan, dengan manfaat sebagai berikut:
  - Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
  - Sebagai indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI
  - Sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)
  - Sebagai indikator yang digunakan dalam penghitungan Dana Insentif Daerah (DID).

### Data Infografis Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan & Nasional (Persen)



### C. Latihan Mandiri

1. Buatlah tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik berdasarkan prinsip *Generic Statistikal Busines Process Model* (GSBPM) pada Studi Kasus “Survey Kepuasan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan”
2. Buatlah analisis data Indikator Strategis BPS dari infografis-infografis yang disajikan pada materi diatas.

## KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA (KMMI) COURSE DATA SAINS UNTUK BISNIS DAN PERKANTORAN

### D. Rangkuman

Modul ini memperkenalkan tentang peranan BPS dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam hal penyediaan data statistik berkualitas bagi perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan. Agar Mahasiswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif, maka didalam modul ini diberikan materi-materi tentang kedudukan BPS dalam penyelenggaraan statistik, proses pengumpulan dan diseminasi Data BPS, serta jenis-jenis data indikator strategis BPS serta pemanfaatannya bagi perencanaan pembangunan. Modul ini juga dilengkapi dengan contoh penerapan tahapan proses pengumpulan data yang memenuhi kaidah GSBPM, serta latihan soal untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan materi yang sudah diperoleh.

### E. Daftar pustaka

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
4. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional
5. Keputusan Kepala BPS Nomor 6 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar
6. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
7. Keputusan Kepala BPS Nomor 8 tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus
8. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah